

RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ENREKANG
2018**



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 417/KEP/IX/2018

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang setelah dilakukan verifikasi telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Enrekang tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabuapten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat :

1. Program dan Kegiatan;

2. Lokasi Kegiatan;
3. Indikator Kinerja;
4. Kelompok Sasaran; dan
5. Pagu Indikatif dan perkiraan maju.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 14 September 2018

BUPATI ENREKANG,



MUSLIMIN BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 417/KEP/IX/2018
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ENREKANG TAHUN
2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kabupaten Enrekang merupakan perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk memaksimalkan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimiliki, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memerlukan dukungan anggaran untuk membiayai program dan kegiatannya. Oleh karena itu diperlukan suatu rencana jangka pendek yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana strategis yang telah ada.

Dalam penyusunan renja ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang tahun 2019.

1.2 . Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kabupaten Enrekang disusun berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604) ;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- 9) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 11) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Peraturan Bupati Enrekang Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yang mencakup evaluasi kinerja DPP-PA tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang tahun 2019-2023 dikaitkan dengan isu strategis yang diperkirakan akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2019;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RKA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang;
- 3) Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun;

1.4 . Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPP-PA Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra DPP-PA, Analisis kinerja pelayanan DPP-PA, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPP-PA, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakt.

Bab III. Tujuan dan Sasaran DPP-PA

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, serta tujuan dan sasaran renja Dinas PP-PA Kabupaten Enrekang.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan DPP-PA

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif tahun 2019 pada Dinas PP-PA Kabupaten Enrekang.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PP-PA Kabupaten Enrekang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang merupakan perangkat daerah yang terbentuk pada akhir tahun 2016 dan melakukan kegiatan mulai tahun 2017. Berikut ini akan disajikan matriks evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPP-PA Sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Enrekang

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2014 s/d 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program/Kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1.02.02.1.02.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	80%	-	70%	70%	100	80%	80%	100	
1.02.02.1.02.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	
1.02.02.1.02.02.01.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	

1.02.02.1.02.02. 01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan di kantor	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.01.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terkoordinasinya program PP-PA	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.01.19	Koordinasi Konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	Terkoordinasinya program PP-PA	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.01.20	Pengelolaan Administrasi keuangan dan Perkantoran	Tersedianya administrasi keuangan dan perkantora	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.01.21	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terciptanya sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai	50%	-	20%	20%	100	15%	35%	70%	
1.02.02.1.02.02. 01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	21 unit	-	6 unit	6 unit	100	-	6 unit	28,57	
1.02.02.1.02.02. 01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan kantor	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	-	1 tahun	50	
1.02.02.1.02.02. 01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	-	1 tahun	50	
1.02.02.1.02.02. 01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	

1.02.02.1.02.02. 01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	2 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2 tahun	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	95%	-	85%	85%	100	95%	95%	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (PSH)	Tersedianya pakaian dinas	90 org	-	35 org	35 org	100	35 org	70 org	78	
1.02.02.1.02.02. 01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur	50%	-	20%	20%	100	30%	50%	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.05.04	Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	50%	-	20%	20%	100	30%	50%	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan yang tepat waktu	95%	-	85%	-	-	95%	95%	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.06.01	Penyusunan Laporan Catatan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Adanya LAKIP	2 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	50	
1.02.02.1.02.02. 01.00.06.02	Penyusunan Pelaporan keuangan bulan, triwulan, semesteran dan akhir tahun	Adanya laporan keuangan bulan, triwulan dan semesteran	4 semester	-	2 semester	2 semester	100	2 semester	4 semester	100	

1.02.02.1.02.02.01.00.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Adanya laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	100	
1.02.02.1.02.02.01.00.06.04	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Adanya laporan realisasi fisik dan keuangan	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	100	
1.02.02.1.02.02.01.00.06.21	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Adanya laporan LPPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	
1.02.02.1.02.02.01.00.09	Program Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran	90%	-	80%	80%	100	90%	90%	100	
1.02.02.1.02.02.01.00.09.01	Penyusunan RKA-SKPD	Adanya RKA	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	100	
1.01.06.1.02.02.01.00.09.02	Penyusunan DPA-SKPD	Adanya DPA	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	100	
1.01.06.1.02.02.01.00.09.03	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Adanya renja	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	100	
1.02.02.1.02.02.01.00.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terutama KDRT	90%	-	85%	85%	100	90%	90%	100	
1.02.02.1.02.02.01.00.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi PUG , PP dan PA	3 Kecamatan	-	-	-	-	3 kec	3 kec	100	

1.02.02.1.02.02. 01.00.15.10	Pembinaan dan Pembentukan Forum Anak	Terbentuknya forum anak	6 Kecamatan	-	2 kec	2 kec	100	4 Kec	6 Kec.	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.15.17	Pertemuan Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)	Terlaksannya pertemuan gugus tugas KLA	4 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	50	
1.02.02.1.02.02. 01.00.15.18	Bimbingan Teknis Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Terlaksananya bimtek indikator KLA	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.02.1.02.02. 01.00.15.19	Evaluasi kabupaten layak anak (KLA)	Terlaksananya pertemuan evaluasi KLA	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.15.20	Penyusunan Perda Kabupaten Layak Anak (KLA)	Adanya perda KLA	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.02.1.02.02. 01.00.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase SKPD teknis yang menerapkan PPRG	55%	-	45%	45%	100	55%	55%	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Adanya pertemuan pokja PUG	2 kali	-	1 kali	1 kali	100	1 kali	2 kali	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.16.08	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Tersedianya SIGA	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.16.13	Penyusunan Data Gender Anak	Tersusunnya buku profil gender dan anak	1 dokumen	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.16.17	Sosialisasi Puskesmas Ramah Anak	Jumlah peserta sosialisasi	40 org	-	-	-	-	-	-	-	

1.02.02.1.02.02. 01.00.16.18	Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta pelatihan	40 org	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.02.1.02.02. 01.00.16.19	Pengadaan Sarana Sekolah Ramah Anak	Adanya sekolah ramah anak	3 sek	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.02.1.02.02. 01.00.16.20	Pengembangan Media KIE Gender dan Anak	Tersedianya media KIE gender dan anak	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100	1 jenis	3 jenis	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.16.22	Pelatihan Analisis Data Gender dan Anak	Jumlah peserta pelatihan	30 org	-	30 org	30 org	100	-	30 org	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.16.23	Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Lembaga/Instansi Terkait	Jumlah peserta pelatihan	50 org	-	-	-	-	50 org	50 org	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga	4 kasus	-	5 kasus	8 kasus	62	4 kasus	4 kasus	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.17.11	Aplikasi Gerakan Sayang Ibu	Terselenggaranya aplikasi GSI	2 desa	-	1 desa	1 desa	100	-	1 desa	50	
1.02.02.1.02.02. 01.00.17.12	Rapat Koordinasi Organisasi Perempuan	Terkoordinasinya organisasi perempuan	27 organisasi	-	12 organisasi	12 organisasi	100	15 organisasi	27 organisasi	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.17.13	Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan	Jumlah peserta pelatihan	60 org	-	-	-	-	125 org	125 org	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.17.14	Koordinasi, pembinaan dan pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Terbentuknya P2TP2A	6 Kecamatan	-	2 kec	2 kec	100	2 Kecamatan	4 Kecamatan	67	
1.02.02.1.02.02. 01.00.17.15	Pembangunan Gedung P2TP2A	Terbangunnya gedung P2TP2A	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	

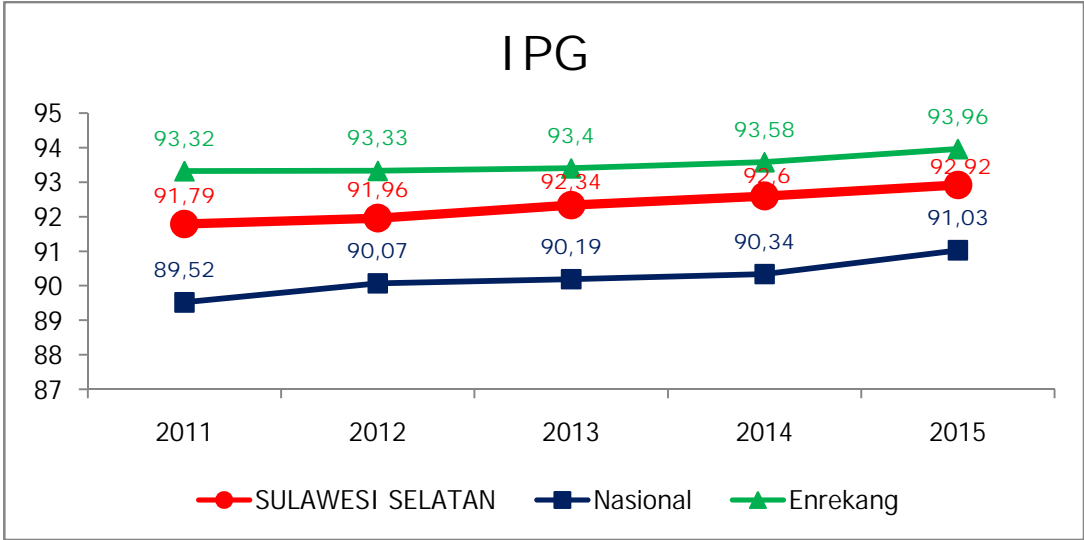
1.02.02.1.02.02. 01.00.17.16	Pengadaan kendaraan operasional P2TP2A	Tersedianya kendaraan operasional P2TP2A	6 unit	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.1.02.02. 01.00.17.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana P2TP2A	Tersedianya sarana dan prasarana P2TP2A	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.1.02.02. 01.00.17.18	Pengadaan Sarana dan prasarana ruang laktasi	Tersedianya peralatan ruang laktasi	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.1.02.02. 01.00.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat partisipasi perempuan dalam proses perencanaan daerah	40%	-	35%	35%	100	40%	40%	100%	
1.02.02.1.02.02. 01.00.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga	40 org	-	-	-	-	40 org	40 org	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.18.04	Pembinaan / peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah kelompok perempuan yang dibina	5 kelompok	-	5 kelompok	5 kelompok	100	-	5 kelompok	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.18.11	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	Terselenggaranya lomba P2WKSS di desa	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.18.14	Pelatihan Kesetaraan Gender dalam Keluarga	Jumlah peserta pelatihan	30 org	-	-	-	-	30 org	30 org	100	
1.02.02.1.02.02. 01.00.18.15	Pelatihan Public Speaking bagi Perempuan	Jumlah peserta pelatihan	40 org	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kabupaten Enrekang menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :

Gambar 2.1
Grafik Perbandingan Capaian IPG Kabupaten Enrekang dengan IPG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2011-2015

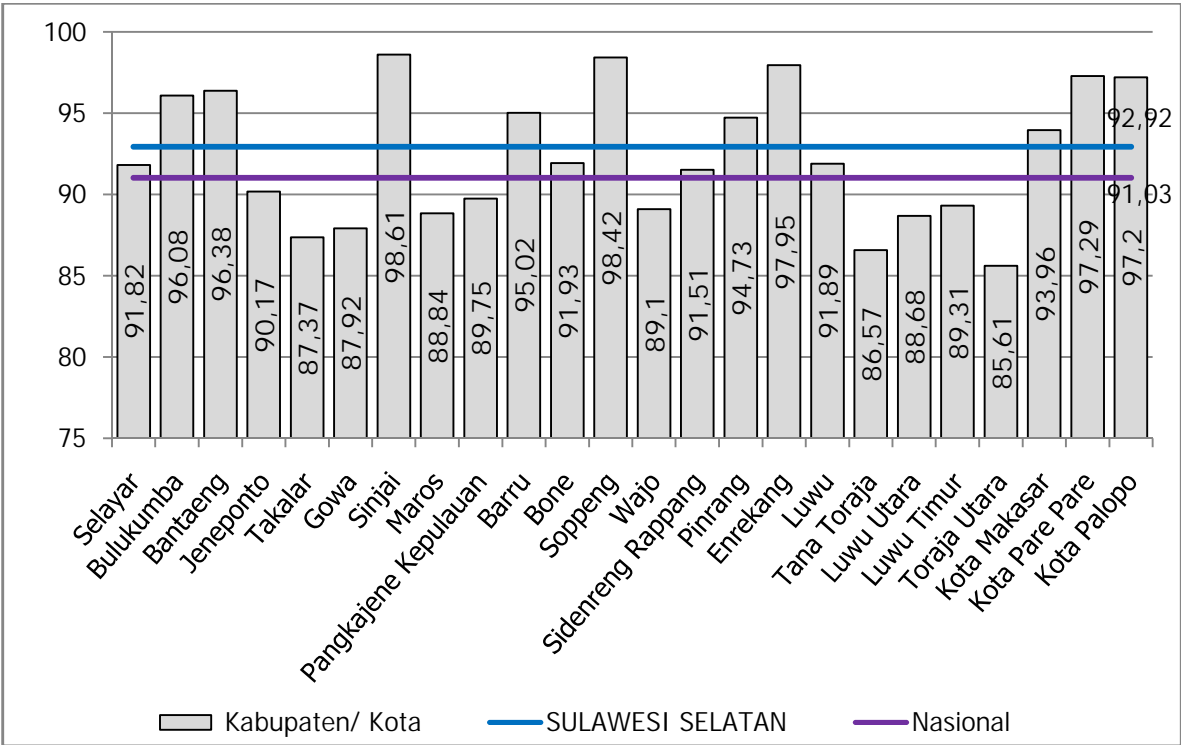


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Melihat capaian IPG Kabupaten Enrekang selama tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan dan berada diatas IPG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Bila dibandingkan dengan IPG Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, IPG

Kabupaten Enrekang berada pada posisi ketiga. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Grafik Persandingan Capaian IPG Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dengan IPG Provinsi dan Nasional Tahun 2015

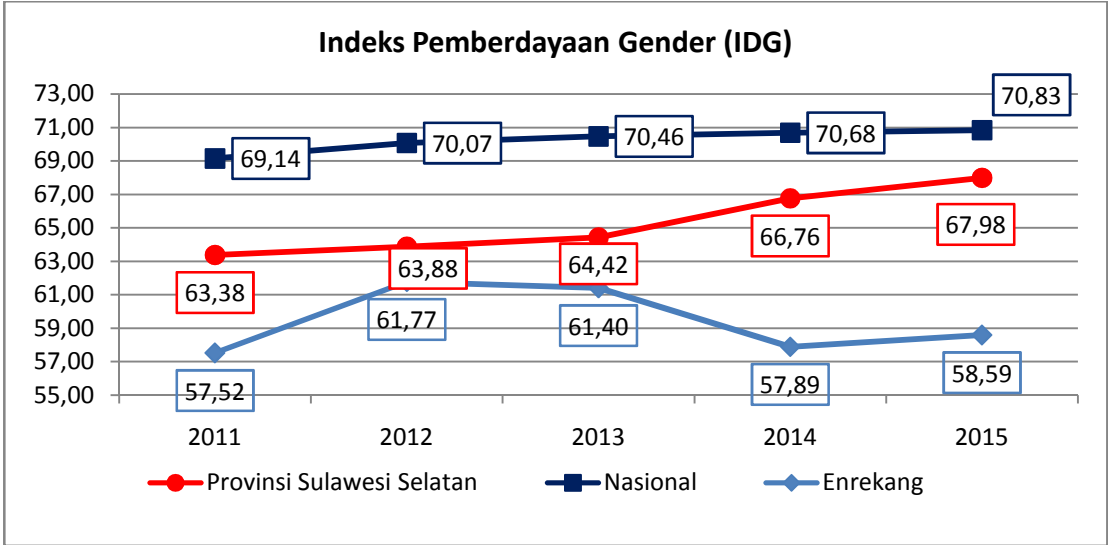


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Enrekang pada tahun 2015 tergolong masih cukup rendah, berada dibawah rata-rata provinsi sulawesi selatan dan nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2013. Penurunan ini antara lain akibat makin rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi di legislatif. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.3
Grafik Perbandingan Capaian IDG Kabupaten Enrekang dengan IDG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2011-2015



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dibandingkan dengan capaian IDG Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, IDG Kabupaten Enrekang termasuk terendah keenam dari 24 Kabupaten/Kota. Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Enrekang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PP-PA
Kabupaten Enrekang

No		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif.		30%			30%	30%		6.67%	6.67%	13.3%	
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		75%			70%	75%		70%	70%	75%	
3.	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)		0			0	0		8 kasus	4 kasus	2 kasus	
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		100%			100%	100%		100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 1 sekretariat dan 4 Bidang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sampai saat ini Dinas PP-PA telah melaksanakan Tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun masih banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dimana permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain : Keterbatasan sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas yang salah satu akibat yang ditimbulkan adalah tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya beberapa hal yang menjadi tantangan kedepan antara lain :

- a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
- b. Masih rendahnya partisipasi perempuan di parlemen.
- c. Masih rendahnya pendapatan perempuan.
- d. Kondisi Geografis, Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Namun demikian tantangan ini harus dihadapi untuk Perkembangan Pembangunan gender dan perlindungan anak kedepan dengan beberapa peluang yang ada antara lain :

- a. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah
- b. Kerjasama Lintas Program dan Sektor terkait
- c. Adanya Partisipasi aktif masyarakat
- d. Adanya regulasi yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Beberapa Isu penting yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kedepan antara lain:

- a. Meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak termasuk TPPO.
- b. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.
- c. Pengembangan pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal.

- d. Sumber daya pada Dinas PP-PA juga masih belum terpenuhi sesuai yang diharapkan dalam pengembangan pembangunan gender dan perlindungan anak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Apabila merujuk kepada rancangan Awal RKPD khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah cukup relevan, dimana usulan awal kegiatan OPD sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan masalah yang ada dimana sebelum rancangan usulan OPD disusun, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun usulan kegiatan program terlebih dahulu menunggu hasil musrenbang desa, kecamatan, koordinasi dan konsolidasi dengan semua program serta sektor terkait lainnya, hasil Forum dan musrenbang Kabupaten dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya kegiatan yang dibuat-buat dan bukan berdasarkan masalah dan kebutuhan organisasi dan semua kegiatan masuk dalam program yang terkait.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Enrekang

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				765.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				765.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Kab. Enrekang	Terbayarnya biaya internet, air dan listrik	1 tahun	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Kab. Enrekang	Terbayarnya biaya internet, air dan listrik	1 tahun	50.000.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Enrekang	Tersedianya instalasi listrik	1 tahun	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Enrekang	Tersedianya instalasi listrik	1 tahun	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Enrekang	Tersedianya bahan bacaan di kantor	8 jenis	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Enrekang	Tersedianya bahan bacaan di kantor	8 jenis	15.000.000	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Enrekang	Terkoordinasinya program PP-PA	1 tahun	250.000.000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Enrekang	Terkoordinasinya program PP-PA	1 tahun	250.000.000	

	Koordinasi Konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	Kab. Enrekang	Terkoordinasinya program PP-PA	1 thn	120.000.000	Koordinasi Konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	Kab. Enrekang	Terkoordinasinya program PP-PA	1 thn	120.000.000	
	Pengelolaan Administrasi keuangan dan Perkantoran	Kab. Enrekang	Tersedianya administrasi keuangan dan perkantora	1 tahun	300.000.000	Pengelolaan Administrasi keuangan dan Perkantoran	Kab. Enrekang	Tersedianya administrasi keuangan dan perkantora	1 tahun	300.000.000	
	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Enrekang	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	1 tahun	15.000.000	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Enrekang	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	1 tahun	15.000.000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				420.000.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				420.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Enrekang	Tersedianya kendaraan dinas operasional	motor 6 unit	120.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Enrekang	Tersedianya kendaraan dinas operasional	motor 6 unit	120.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Enrekang	tersedianya perlengkapan kantor	10 unit	100.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Enrekang	tersedianya perlengkapan kantor	100 unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Enrekang	Tersedianya peralatan kantor	10 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Enrekang	Tersedianya peralatan kantor	10 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kab. Enrekang	Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kab. Enrekang	Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	50.000.000	

	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Kab. Enrekang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Roda dua 8 unit dan roda empat 2 unit	60.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Kab. Enrekang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Roda dua 8 unit dan roda empat 2 unit	60.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Enrekang	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 tahun	15.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Enrekang	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 tahun	15.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung Kantor	Kab. Enrekang	Terpeliharanya peralatan kantor	1 tahun	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung Kantor	Kab. Enrekang	Terpeliharanya peralatan kantor	1 tahun	25.000.000	
	Program peningkatan disiplin aparatur				45.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur				45.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya PDH)	Kab. Enrekang	Tersedianya pakaian dinas	40 orang	45.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya PSH)	Kab. Enrekang	Tersedianya pakaian dinas	40 orang	45.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				125.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				125.000.000	
	Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS	Kab. Enrekang	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	25 orang	125.000.000	Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS	Kab. Enrekang	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	25 orang	125.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				15.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				15.000.000	

	Penyusunan Laporan Catatan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Enrekang	Adanya LAKIP	15 eks.	3.000.000	Penyusunan Laporan Catatan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Enrekang	Adanya LAKIP	15 eks.	3.000.000	
	Penyusunan Pelaporan keuangan bulan, triwulan, semesteran dan akhir tahun	Kab. Enrekang	Adanya laporan keuangan bulan, triwulan dan semesteran	3 lap	3.000.000	Penyusunan Pelaporan keuangan bulan, triwulan, semesteran dan akhir tahun	Kab. Enrekang	Adanya laporan keuangan bulan, triwulan dan semesteran	3 lap	3.000.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Kab. Enrekang	Adanya laporan keuangan akhir tahun	1 kali	3.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Kab. Enrekang	Adanya laporan keuangan akhir tahun	1 kali	3.000.000	
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Kab. Enrekang	Adanya laporan realisasi fisik dan keuangan	4 triwulan	3.000.000	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Kab. Enrekang	Adanya laporan realisasi fisik dan keuangan	4 triwulan	3.000.000	
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. Enrekang	Adanya laporan LPPD	1 dok	3.000.000	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. Enrekang	Adanya laporan LPPD	1 dok	3.000.000	
	Program Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran SKPD				34.000.000	Program Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran SKPD				34.000.000	
	Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Enrekang	Adanya RKA	1 dok	3.000.000	Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Enrekang	Adanya RKA	1 dok	3.000.000	
	Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Enrekang	Adanya DPA	1 dok	3.000.000	Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Enrekang	Adanya DPA	1 dok	3.000.000	
	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra	Kab. Enrekang	Adanya dokumen renstra	1 dok	25.000.000	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra	Kab. Enrekang	Adanya dokumen renstra	1 dok	25.000.000	

	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Kab. Enrekang	Adanya renja	1 dok	3.000.000	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Kab. Enrekang	Adanya renja	1 dok	3.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				330.000.000	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				330.000.000	
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan	Kab. Enrekang	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	30.000.000	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan	Kab. Enrekang	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	30.000.000	
	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum/pokja PUG	Kab. Enrekang	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	5 PD	50.000.000	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum/pokja PUG	Kab. Enrekang	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	5 PD	50.000.000	
	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum Pemberdayaan Perempuan bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan	Kab. Enrekang	Terbentuk dan aktifnya forum pemberdayaan perempuan	2 forum	40.000.000	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum Pemberdayaan Perempuan bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan	Kab. Enrekang	Terbentuk dan aktifnya forum pemberdayaan perempuan	2 forum	40.000.000	
	Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.	Kab. Enrekang	Terbangunnya koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 kali	35.000.000	Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.	Kab. Enrekang	Terbangunnya koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2 kali	35.000.000	

	Peningkatan pengetahuan/ keterampilan bagi perempuan	Kab. Enrekang	Jumlah perempuan yang mendapat peningkatan keterampilan	100 org	75.000.000	Peningkatan pengetahuan/ keterampilan bagi perempuan	Kab. Enrekang	Jumlah perempuan yang mendapat peningkatan keterampilan	100 org	75.000.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Kab. Enrekang	Adanya pembinaan perempuan kepala keluarga	1 kali	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Kab. Enrekang	Adanya pembinaan perempuan kepala keluarga	1 kali	100.000.000	
	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan				535.000.000	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan				535.000.000	
	Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Kab. Enrekang	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	150.000.000	Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Kab. Enrekang	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	150.000.000	
	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Kab. Enrekang	Terbentuk dan beroperasinya lembaga P2TP2A	3 kec	250.000.000	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Kab. Enrekang	Terbentuk dan beroperasinya lembaga P2TP2A	3 kec	250.000.000	
	Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana	Kab. Enrekang	Tersusunnya SOP pelayanan korban kekerasan	1 dokumen	30.000.000	Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana	Kab. Enrekang	Tersusunnya SOP pelayanan korban kekerasan	1 dokumen	30.000.000	

	perdagangan orang.					perdagangan orang.					
	Bimbingan teknis pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi SDM penyedia layanan korban kekerasan.	Kab. Enrekang	Terselenggaranya bimbingan teknis SDM penyedia layanan	1 kali	30.000.000	Bimbingan teknis pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi SDM penyedia layanan korban kekerasan.	Kab. Enrekang	Terselenggaranya bimbingan teknis SDM penyedia layanan	1 kali	30.000.000	
	Peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan	Kab. Enrekang	Terselenggaranya peningkatan SDM pendamping korban kekerasan	1 kali	45.000.000	Peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan	Kab. Enrekang	Terselenggaranya peningkatan SDM pendamping korban kekerasan	1 kali	45.000.000	
	Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan lingkup kabupaten.	Kab. Enrekang	Terlaksananya koordinasi jejaring lembaga layanan perlindungan perempuan	1 kali	30.000.000	Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan lingkup kabupaten.	Kab. Enrekang	Terlaksananya koordinasi jejaring lembaga layanan perlindungan perempuan	1 kali	30.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga				125.000.000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga				125.000.000	
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga.	Kab. Enrekang	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	25.000.000	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga.	Kab. Enrekang	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	25.000.000	
	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan lembaga peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA).	Kab. Enrekang	Terbentuk dan berfungsinya lembaga PUSPAGA	1 unit	50.000.000	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan lembaga peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA).	Kab. Enrekang	Terbentuk dan berfungsinya lembaga PUSPAGA	1 unit	50.000.000	

	Peningkatan peranan keluarga menuju ketahanan dan kesejahteraan (P2K3)	Kab. Enrekang	Terselenggaranya penilaian P2K3	1 desa	50.000.000	Peningkatan peranan keluarga menuju ketahanan dan kesejahteraan (P2K3)	Kab. Enrekang	Terselenggaranya penilaian P2K3	1 desa	50.000.000	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				235.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				235.000.000	
	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Kab. Enrekang	Berfungsinya sistem informasi gender dan anak	1 unit	75.000.000	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Kab. Enrekang	Berfungsinya sistem informasi gender dan anak	1 unit	75.000.000	
	Bimbingan teknis bagi SDM pengelola data gender dan anak tingkat kabupaten.	Kab. Enrekang	Jumlah pengelola data yang ikut bimtek	30 org	35.000.000	Bimbingan teknis bagi SDM pengelola data gender dan anak tingkat kabupaten.	Kab. Enrekang	Jumlah pengelola data yang ikut bimtek	30 org	35.000.000	
	Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten	Kab. Enrekang	Tersusunnya profil gender dan anak	20 Expl.	30.000.000	Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten	Kab. Enrekang	Tersusunnya profil gender dan anak	20 Expl.	30.000.000	
	Monitoring dan evaluasi penyediaan data gender dan anak.	Kab. Enrekang	Terselenggaranya monev penyediaan data gender dan anak	2 kali	25.000.000	Monitoring dan evaluasi penyediaan data gender dan anak.	Kab. Enrekang	Terselenggaranya monev penyediaan data gender dan anak	2 kali	25.000.000	
	Pengembangan media KIE gender dan anak.	Kab. Enrekang	Tersedianya media KIE gender dan anak	5 jenis	45.000.000	Pengembangan media KIE gender dan anak.	Kab. Enrekang	Tersedianya media KIE gender dan anak	5 jenis	45.000.000	

	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (APE)	Kab. Enrekang	Terselenggaranya evaluasi APE	1 kali	25.000.000	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (APE)	Kab. Enrekang	Terselenggaranya evaluasi APE	1 kali	25.000.000	
	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				420.000.000	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				420.000.000	
	Perumusan kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.	Kab. Enrekang	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	150.000.000	Perumusan kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.	Kab. Enrekang	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	150.000.000	
	Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Ramah Anak	Kab. Enrekang	Tersosialisasinya pelayanan kesehatan ramah anak	1 kali	30.000.000	Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Ramah Anak	Kab. Enrekang	Tersosialisasinya pelayanan kesehatan ramah anak	1 kali	30.000.000	
	Pembinaan sekolah ramah anak	Kab. Enrekang	Terbinanya sekolah ramah anak	10 sekolah	50.000.000	Pembinaan sekolah ramah anak	Kab. Enrekang	Terbinanya sekolah ramah anak	10 sekolah	50.000.000	
	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum anak	Kab. Enrekang	Terbentuk dan berfungsinya forum anak	20 forum	100.000.000	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum anak	Kab. Enrekang	Terbentuk dan berfungsinya forum anak	20 forum	100.000.000	
	Pelatihan konvensi hak anak bagi instansi/lembaga terkait	Kab. Enrekang	Jumlah peserta pelatihan KHA	50 orang	50.000.000	Pelatihan konvensi hak anak bagi instansi/lembaga terkait	Kab. Enrekang	Jumlah peserta pelatihan KHA	50 orang	50.000.000	

	Rapat koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak	Kab. Enrekang	Adanya rapat koordinasi gugus tugas KLA	4 kali	20.000.000	Rapat koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak	Kab. Enrekang	Adanya rapat koordinasi gugus tugas KLA	4 kali	20.000.000	
	Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kab. Enrekang	Terselenggaranya penilaian KLA	1 kali	20.000.000	Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kab. Enrekang	Terselenggaranya penilaian KLA	1 kali	20.000.000	
	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak				140.000.000	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak				140.000.000	
	Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	Kab. Enrekang	Tersusunnya SOP pelayanan perlindungan anak	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	Kab. Enrekang	Tersusunnya SOP pelayanan perlindungan anak	1 dokumen	25.000.000	
	Penguatan jejaring pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	Kab. Enrekang	Adanya pertemuan jejaring perlindungan anak	1 kali	30.000.000	Penguatan jejaring pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	Kab. Enrekang	Adanya pertemuan jejaring perlindungan anak	1 kali	30.000.000	
	Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak (SPA)	Kab. Enrekang	Tersosialisasi-nya sistem perlindungan anak	40 orang	35.000.000	Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak (SPA)	Kab. Enrekang	Tersosialisasi-nya sistem perlindungan anak	40 orang	35.000.000	

	Pembentukan dan pembinaan lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Kab. Enrekang	Terbentuknya lembaga PATBM	10 buah	50.000.000	Pembentukan dan pembinaan lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Kab. Enrekang	Terbentuknya lembaga PATBM	10 buah	50.000.000	
	Jumlah				3.189.000.000					3.189.000.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk usulan program kegiatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang disampaikan lewat musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan dan forum SKPD di tingkat kabupaten. Sehingga dalam penyusunan usulan betul-betul berdasarkan masalah yang ada dan kebutuhan organisasi mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dengan memperhatikan isu-isu penting sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk jelasnya usulan-usulan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembinaan dan pembentukan forum anak	Kec. Masalle, Kec. Bungin	Terbentuknya forum anak	2 forum	
2	Pembinaan/pembentukan P2TP2A	Kec. Masalle	Terbentuknya P2TP2A	1 lembaga	
3	Pembinaan dan peningkatan kegiatan keterampilan	Ds. Buntu Sarong, Ds. Bulu	Meningkatnya keterampilan perempuan	2 desa	
4	Penyusunan data gender dan anak	Kec. Bungin	Tersedianya data gender dan anak	1 kali	
5	Pembinaan pokja PUG	Kec. Bungin	Terbiannya pokja PUG	1 kali	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nasional tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

A. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi: 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; 3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG; serta 4) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan strategi: 1) Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara lengkap dan kontinyu; 2) Peningkatan advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; 3) Penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera; 4) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial); 5) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP; dan 6) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Ketiga, meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan strategi: 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah; 2) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; 3) Peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah; 4) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/kegiatan pembangunan; 5) Identifikasi dan revisi peraturan perundangundangan dan kebijakan terkait KtP yang disharmonis; 6) Penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; 7) Sosialisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan terkait KtP kepada semua pemangku kepentingan; 8) Penguatan mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; 9) Peningkatan efektivitas pelatihan SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; 10) Pengembangan insentif untuk SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; dan 11) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP.

B. Perlindungan Anak

Pertama, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup dengan strategi: 1) Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan; 2) Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak; 3) Percepatan kepemilikan akta kelahiran; 4) Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak; 5)

Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak; 6) Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak; 7) Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan 8) Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak.

Kedua, penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui strategi: 1) Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak; 2) Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis **restorative justice**, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak; 3) Peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak; 4) Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif; 5) Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan; 6) Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat; 7) Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa; 8) Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan 9) Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.

Ketiga, peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui strategi: 1) penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; 2) peningkatan koordinasi antar instansi

pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan; 3) penguatan sistem manajemen dan pemanfaatan data dan informasi lintas kementerian/lembaga/SKPD; dan 4) peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

a. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Enrekang tahun 2018 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai insan pembangunan;
- 2) Meningkatkan perlindungan kesejahteraan perempuan dan anak dalam rumah tangga / keluarga serta masyarakat;
- 3) Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi program Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Organisasi Perempuan di masyarakat.

b. Sasaran

Agar Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan berhasilguna dan berdayaguna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang sampai akhir tahun 2018, adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas hidup perempuan di semua sektor kehidupan yang terkait dengan agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- 2) Meningkatnya perlindungan kesejahteraan perempuan dan anak dalam rumah tangga / keluarga serta masyarakat;
- 3) Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- 4) Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi program Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Organisasi Perempuan di masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 merencanakan 12 program dan 56 kegiatan dengan pagu indikatif yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.189.000.000,-. Berikut ini rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang yang tertuang dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas PP-PA Kabupaten Enrekang Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja 2018						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
1.02.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
1.02.02.1.02.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	80%					765.000.000	841.500.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik			ENREKANG			Terbayarnya biaya internet, air dan listrik	1 tahun	Berfungsinya internet, air dan listrik	100%	50.000.000	55.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor			ENREKANG			Tersedianya instalasi listrik	1 tahun	berfungsinya listrik di kantor	100%	15.000.000	16.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			ENREKANG			Tersedianya bahan bacaan di kantor	8 jenis	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan	75%	15.000.000	16.500.000	DPP-PA	1

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang Tahun 2019

1.02.02.1.02.0 2.01.00.01.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			ENREKANG			Terkoordinasi ya program PP-PA	1 tahun	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan	75%	250.000.000	275.000.000	DPP -PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.01.19	Koordinasi Konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan			ENREKANG			Terkoordinasi ya program PP-PA	1 thn	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan	75%	120.000.000	132.000.000	DPP -PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.01.20	Pengelolaan Administrasi keuangan dan Perkantoran			ENREKANG			Tersedianya administrasi keuangan dan perkantora	1 tahun	Berfungsinya pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran	75%	300.000.000	330.000.000	DPP -PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.01.21	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan perlengkapan Gedung Kantor			ENREKANG			Tersedianya peralatan kebersihan kantor	1 tahun	Meningkatnya kinerja dan kenyamanan aparatur	75%	15.000.000	16.500.000	DPP -PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)			Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	75%					420.000.000	462.000.000		
1.02.02.1.02.0 2.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			ENREKANG			Tersedianya kendaraan dinas operasional	motor 6 unit	Lancarnya kegiatan diluar gedung kantor	75%	120.000.000	132.000.000	DPP -PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			ENREKANG			Tersedianya perlengkapan kantor	10 unit	Lancarnya kegiatan kantor	75%	100.000.000	110.000.000	DPP -PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			ENREKANG			Tersedianya peralatan kantor	10 unit	Lancarnya kegiatan kantor	75%	50.000.000	55.000.000	DPP -PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor			ENREKANG			Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	Terciptanya kondisi kerja yang baik dan nyaman	100%	50.000.000	55.000.000	DPP -PA	1

1.02.02.1.02.0 2.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional			ENREKANG			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Roda 2, 8 unit dan roda 4, 2 unit	Terciptanya kendaraan dinas yang layak pakai	100%	60.000.000	66.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.02.26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor			ENREKANG			Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 tahun	Berfungsinya alat-aat kantor dengan baik	75%	15.000.000	16.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung Kantor			ENREKANG			Terpeliharanya peralatan kantor	1 tahun	Berfungsinya alat-alat kantor dengan baik	75%	25.000.000	27.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)				75%					45.000.000	49.500.000		
1.02.02.1.02.0 2.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya PDH)			ENREKANG			Tersedianya pakaian dinas	35 orang	Meningkatnya disiplin ASN	100%	45.000.000	49.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)				75%					125.000.000	137.500.000		

1.02.02.1.02.0 2.01.00.05.04	Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS			ENREKANG			Jumlah PNS yang mengikuti diklat	25 orang	Meningkatnya SDM aparatur	80%	125.000.000	137.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)			Tingkat capaian laporan kinerja dan keuangan	80%					15.000.000	16.500.000		
1.02.02.1.02.0 2.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Catatan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			ENREKANG			Adanya LAKIP	15 eks.	Terwujudnya dokumen lakip	100%	3.000.000	3.300.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.06.02	Penyusunan Pelaporan keuangan bulan, triwulan, semesteran dan akhir tahun			ENREKANG			Adanya laporan keuangan bulan, triwulan dan semesteran	3 lap	Terwujudnya laporan keuangan bulan, triwulan dan semesteran	100%	3.000.000	3.300.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun			ENREKANG			Adanya laporan keuangan akhir tahun	1 kali	Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun	100%	3.000.000	3.300.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.06.04	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan			ENREKANG			Adanya laporan realisasi fisik dan keuangan	4 triwulan	Terwujudnya laporan realisasi fisik dan keuangan	100%	3.000.000	3.300.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.06.21	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			ENREKANG			Adanya laporan LPPD	1 dok	Terwujudnya dokumen LPPD	100%	3.000.000	3.300.000	DPP-PA	1

1.02.02.1.02.02.01.00.09	Program Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)			Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran SKPD	85%					34.000.000	37.400.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.09.01	Penyusunan RKA-SKPD			ENREKANG			Adanya RKA	1 dok	Terwujudnya dokumen RKA	100%	3.000.000	3.300.000	DPP-PA	1
1.01.06.1.02.02.01.00.09.02	Penyusunan DPA-SKPD			ENREKANG			Adanya DPA	1 dok	Terwujudnya dokumen DPA	100%	3.000.000	3.300.000	DPP-PA	1
1.01.06.1.02.02.01.00.09.03	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)			ENREKANG			Adanya renstra	1 dok	Terwujudnya dokumen renstra	100%	25.000.000	27.500.000	DPP-PA	1
1.01.06.1.02.02.01.00.09.06	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)			ENREKANG			Adanya renja	1 dok	Terwujudnya dokumen Renja	100%	3.000.000	3.300.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	10%					330.000.000	363.000.000		

1.02.02.1.02.0 2.01.00.20.01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan			ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung upaya peningk kualitas hidup perempuan	50%	30.000.000	33.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.20.02	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum/pokja PUG			ENREKANG			Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	5 PD	Terwujudnya PPRG pada perangkat daerah	10%	50.000.000	55.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.20.03	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum Pemberdayaan Perempuan bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan			ENREKANG			Terbentuk dan aktifnya forum pemberdayaan perempuan	2 forum	Menguatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	50%	40.000.000	44.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.20.04	Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.			ENREKANG			Terbangunnya koordinasi jejaring lembaga penyedia layanan pemberdaya-an perempuan	2 kali	Manguatnya jejaring layanan pemberdayaan perempuan	40%	35.000.000	38.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.20.05	Peningkatan pengetahuan/ keterampilan bagi perempuan			ENREKANG			Jumlah perempuan yang mendapat peningkatan keterampilan	100 org	Meningkatnya keterampilan perempuan yang dibina	75%	75.000.000	82.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.20.06	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)			ENREKANG			Adanya pembinaan perempuan kepala keluarg	1 kali	Meningkatnya kemampuan perempuan kepala keluarga	50%	100.000.000	110.000.000	DPP-PA	1

1.02.02.1.02.02.01.00.21	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	5%					535.000.000	588.500.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.21.01	Perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.			ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung upaya peningk. kualitas hidup perempuan	50%	150.000.000	165.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.21.02	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)			ENREKANG			Terbentuk dan beroperasinya lembaga P2TP2A	3 kec	Meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	50%	250.000.000	275.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.21.03	Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang.			ENREKANG			Tersusunnya SOP pelayanan korban kekerasan	1 dokumen	Terlayannya korban kekerasan sesuai standar	50%	30.000.000	33.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.21.04	Bimbingan teknis pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi SDM penyedia layanan korban kekerasan.			ENREKANG			Terselenggaranya bimbingan teknis SDM penyedia layanan	1 kali	Meningkatnya kualitas pelayanan	50%	30.000.000	33.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.21.05	Peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan			ENREKANG			Terselenggaranya peningkatan SDM	1 kali	Meningkatnya pelayanan terhadap korban kekerasan	50%	45.000.000	49.500.000	DPP-PA	1

							pendamping korban kekerasan							
1.02.02.1.02.0 2.01.00.21.06	Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan lingkup kabupaten.			ENREKANG			Terlaksananya koordinasi jejaring lembaga layanan perlindungan perempuan	1 kali	Meningkatnya koordinasi pelayanan perlindungan perempuan	50%	30.000.000	33.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.22	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Persentase keluarga yang terlayani sesuai standar	5 %					125.000.000	137.500.000		
1.02.02.1.02.0 2.01.00.22.01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga.			ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga	50%	25.000.000	27.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.22.02	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan lembaga peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA).			ENREKANG			Terbentuk dan berfungsinya lembaga PUSPAGA	1 unit	Meningkatnya pelayanan PUSPAGA	30%	50.000.000	55.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.0 2.01.00.22.03	Peningkatan peranan keluarga menuju ketahanan dan kesejahteraan (P2K3)			ENREKANG			Terselenggaranya penilaian P2K3	1 Desa	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	30%	50.000.000	55.000.000	DPP-PA	1

1.02.02.1.02.02.01.00.23	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki Perempuan	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak	20%					235.000.000	258.500.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.23.01	Pengembangan sistem informasi gender dan anak			ENREKANG			Berfungsinya sistem informasi gender dan anak	1 unit	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	70%	75.000.000	82.500.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.23.02	Bimbingan teknis bagi SDM pengelola data gender dan anak tingkat kabupaten.			ENREKANG			Jumlah pengelola data yang ikut bimtek	30 org	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola data	75%	35.000.000	38.500.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.23.03	Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten			ENREKANG			Tersusunnya profil gender dan anak	20 Expl.	Tersedianya buku profil gender dan anak	80%	30.000.000	33.000.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.23.04	Monitoring dan evaluasi penyediaan data gender dan anak.			ENREKANG			Terselenggaranya monev penyediaan data gender dan anak	2 kali	Terpantaunya penyediaan data gender dan anak	90%	25.000.000	27.500.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.23.05	Pengembangan media KIE gender dan anak.			ENREKANG			Tersedianya media KIE gender dan anak	5 jenis	Tersosialisasinya program DP3A di masyarakat	70%	45.000.000	49.500.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.23.06	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (APE)			ENREKANG			Terselenggaranya evaluasi APE	1 kali	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	70%	25.000.000	27.500.000		

1.02.02.1.02.02.01.00.24	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki Perempuan	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Capaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	>500 poin					420.000.000	462.000.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.24.01	Perumusan kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.			ENREKANG			Jumlah kebijakan yang dibuat	1 buah	Tersedianya aturan yang mendukung pemenuhan hak anak	50%	150.000.000	165.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.24.02	Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Ramah Anak			ENREKANG			Tersosialisasinya pelayanan kesehatan ramah anak	1 kali	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang ramah anak	50%	30.000.000	33.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.24.03	Pembinaan sekolah ramah anak			ENREKANG			Terbinanya sekolah ramah anak	10 sekolah	Meningkatnya sekolah ramah anak	10%	50.000.000	55.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.24.04	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum anak			ENREKANG			Terbentuk dan berfungsinya forum anak	20 forum	Meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan	15%	100.000.000	110.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.24.05	Pelatihan konvensi hak anak bagi instansi/lembaga terkait			ENREKANG			Jumlah peserta pelatihan KHA	50 orang	Meningkatnya pengetahuan akan hak-hak anak	70%	50.000.000	55.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.24.06	Rapat koordinasi gugus tugas kabupaten layak anak			ENREKANG			Adanya rapat koordinasi gugus tugas KLA	4 kali	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	70%	20.000.000	22.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.24.07	Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)			ENREKANG			Terselenggaranya penilaian KLA	1 kali	Jumlah skor KLA	>500	20.000.000	22.000.000	DPP-PA	1

1.02.02.1.02.02.01.00.25	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki Perempuan	Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar	15%					140.000.000	154.000.000		
1.02.02.1.02.02.01.00.25.01	Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.			ENREKANG			Tersusunnya SOP pelayanan perlindungan anak	1 dokumen	Meningkatnya pelayanan perlindungan anak	50%	25.000.000	27.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.25.02	Penguatan jejaring pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.			ENREKANG			Adanya pertemuan jejaring perlindungan anak	1 kali	Menguatnya jejaring perlindungan anak	40%	30.000.000	33.000.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.25.03	Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak (SPA)			ENREKANG			Tersosialisasinya sistem perlindungan anak	40 orang	Terwujudnya sistem perind. anak secara maksimal	50%	35.000.000	38.500.000	DPP-PA	1
1.02.02.1.02.02.01.00.25.04	Pembentukan dan pembinaan lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)			ENREKANG			Terbentuknya lembaga PATBM	10 buah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm perlindungan anak	20%	50.000.000	55.000.000	DPP-PA	1
Jumlah											3.189.000.000	3.507.900.000		

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang ini dibuat, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang pada Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan input dari berbagai sumber termasuk usulan dari masyarakat melalui Musrembang atau perkembangan Pembangunan di sekitar kita yang berkaitan dengan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang.



BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO